

KERUKUNAN HORIZONTAL (Mengembangkan Potensi Positif dalam Beragama)

Oleh: Rina Rehayati, M.Ag

Abstrak

Ada dua kecenderungan penganut agama, yaitu fanatik dan toleran. Rasulullah saw menyadari dua kecenderungan tersebut, oleh sebab itu ketika Rasulullah saw diangkat sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, Kebijakan politik yang pertama kali ditempuh oleh Nabi saw yaitu membuat perjanjian tertulis dengan penganut agama Nasrani dan Yahudi di Madinah. Perjanjian tertulis itu kemudian diberi nama Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan upaya menghapus jurang pemisah antara suku-suku yang bertikai di Madinah, dan menyatukan seluruh penduduk Madinah yang majemuk menjadi satu kesatuan. Selain itu, Rasulullah saw juga berusaha mempererat hubungan antara masyarakat Anshor dengan Muhajirin melalui ikatan persaudaraan antar mereka. Agaknya Nabi sangat menyadari bahwa dasar pondasi suatu negara tidak akan kuat kecuali didasari oleh kerukunan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Key word: Kerukunan, Horizontal, Toleran, Fanatisme.

Pendahuluan

Awal Nopember 2008, pelaku peristiwa Bom Bali 1, Imam Samudra dkk akan di jatuhkan hukum mati. Peristiwa Bom Bali yang menghentak dunia itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jln. Legian-Kuta Bali, menjatuhkan korban 202 orang. Meskipun toleransi beragama telah diupayakan sejak masa Orde Baru, namun tetap saja tidak bisa menjamin tidak munculnya kaum fundamentalis ekstrim seperti Imam Samudra dkk. Dari peristiwa Bom Bali sikap umat Islam ada yang pro dan ada pula yang kontra. Umat Islam seakan dihadapkan dengan sikap yang dilematis. Di satu sisi, apabila mereka terlalu toleran dengan penganut agama lain, maka mereka akan dianggap lemah dan mudah dipengaruhi. Sebaliknya, di sisi lain, apabila mereka bersikap fanatik, maka kecurigaan, kebencian dan permusuhan tak bisa dielakkan.

Pada setiap penganut agama selalu ada dua kecenderungan tersebut, yaitu fanatisme dan toleransi. Amsal Bakhtiar menggunakan istilah variabel ‘fanatik’ dan ‘ekstrim’, yang kemudian dia analisis menjadi empat kelompok, yaitu fanatik tidak

ekstrem, fanatik yang ekstrem, tidak fanatik tapi ekstrim dan tidak ekstrem.ⁱ Kecenderungan fanatik memunculkan sikap yang tidak ingin bergaul dengan penganut agama lain, menganggap keyakinan mereka yang benar, penganut agama lain salah, sesat dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai teman. Sedangkan bagi mereka yang cenderung toleran, memunculkan sikap yang justru sebaliknya. Kecenderungan sikap toleransi yang terbuka kepada penganut agama lain, seringkali dianggap sebagai penganut agama yang akan menyesatkan agama mereka sendiri. Bahkan, dianggap sebagai penganut agama sesat dan dikategorikan kafir.

Bagi umat Islam yang fanatis, mereka merujuk ayat:

“Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama) itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”
(Q.S: Ali ‘Imran: 85).

Adapun bagi yang toleran, mereka merujuk ayat:

“Katakanlah! Wahai Ahli al-Kitab marilah kita kembali (bersatu) kepada kalimat yang sama atas keyakinan kita....

Kedua ayat tersebut jika di baca secara utuh tentu saja akan memiliki makna yang tendensius. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap kita? Rasulullah saw berpesan pada umatnya untuk berpegang teguh kepada al-Qur’an secara utuh (*kaffah*), supaya tidak salah interpretasi terhadap firman Allah. Islam datang dan di bawa oleh Rasulullah untuk memberi rahmat dan kedamaian bagi semesta alam. Ketidak seimbangan keduanya akan menimbulkan masalah bagi manusia. Toleransi yang berlebihan akan terjebak pada pengaburan makna agamanya sendiri. Sedangkan bagi penganut agama yang fanatismenya berlebihan akan menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama menurut Charles Kimball disebabkan menghadapi lima situasi. *Pertama*, ketika mengklaim bahwa agama merekalah yang benar, agama lain sesat oleh sebab itu harus dimusuhi; *Kedua*, beragama dengan ketaatan yang berlebihan terhadap pemimpin agama; *Ketiga*, ingin merealisasikan kejayaan masa lalu, masa-masa kejayaan dan kegemilangan bagi penganutnya; *Keempat*, ketika termotivasi ingin mencapai tujuan tertentu, seperti: mempertahankan tempat suci,

melindungi agama, mempertegas identitas kelompok; *kelima*, ketika ada seruan perang suci (*Holy War*)ⁱⁱ

Piagam Madinah: Strategi Rasulullah Mempersatukan Penganut Agama

Rasulullah saw di utus oleh Allah SWT untuk menyeru umat manusia ke dalam agama Islam. Makna “menyeru” di sini mengajak tanpa paksaan. Dalam sejarah di catat bahwa keberhasilan dakwah Rasulullah bukan dari kekerasan, bahkan sebaliknya, dengan lemah lembut, damai dan tindakan bijak dan cerdas. Meski pun ada beberapa peperangan yang terjadi pada masa itu. Perang tersebut merupakan pilihan terakhir ketika pihak lawan menantang dan menyerang.

Ketika beliau diangkat sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, Kebijakan politik yang pertama kali ditempuh oleh Nabi saw membuat MoU, perjanjian tertulis dengan penganut agama Nasrani dan Yahudi di Madinah. Piagam Madinah merupakan upaya menghapuskan jurang pemisah antara suku-suku yang bertikai di Madinah, dan berusaha menyatukan seluruh penduduk Madinah sebagai satu kesatuan. Pada sisi lainnya, Nabi berusaha mempererat hubungan antara masyarakat Anshor dengan Muhajirin melalui ikatan persaudaraan antar mereka. Agaknya Nabi sangat menyadari bahwa dasar pondasi suatu negara tidak akan kuat kecuali didasari oleh kerukunan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk sangat diperlukan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini kebijakan yang ditempuh Nabi bersandar pada prinsip “saling hidup dan menghidupi”. Nabi berusaha mendirikan lembaga kesejahteraan umum. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan ini Nabi memprakarsai penyusunan suatu perjanjian atau konsensus bersama yang dikenal dengan sebutan “Piagam Madinah”. Dengan tersusunnya perjanjian tersebut, maka berakhirlah permusuhan dan pertumpahan darah sesama saudara. Hak-hak dan kewajiban setiap golongan warga masyarakat dipertegas dalam piagam ini, khususnya bagi golongan Yahudi yang tinggal di Madinah.

Piagam Madinah ini sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan politik umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad saw belum ada penguasa di dunia

yang menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya. Nabi Muhammad lah tokoh pertama yang menyadari arti pentingnya keterlibatan rakyat dan dukungan mereka dalam suatu sistem administrasi Negara. Selain itu, piagam ini juga menunjukkan bahwa Muhammad bukanlah hanya sebagai penyebar agama (Rasul), melainkan juga sebagai seorang negarawan yang besar. “Negara Madinah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah negarawan terbesar, tidak hanya pada zamannya, melainkan juga terbesar sepanjang sejarah”. Pasal-Pasal yang dirumuskan dalam piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya bermaksud memperkuat kekuasaannya untuk menghadapi serangan musyrik Makkah, tetapi tujuan yang utama justru untuk menggalang kerukunan bagi warga Negara di kota Madinah.ⁱⁱⁱ

Dari sikap Rasulullah saw sebagai kepala Negara yang tidak memusuhi dan mengusir penganut agama lain dari Madinah, beliau seolah ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa kemajemukan suatu hal yang alamiah. Kita tidak mungkin mampu memaksakan semuanya harus sama. Pluralisme keagamaan biasanya menghasilkan tiga tema dan prinsip, yaitu: *pertama*, pluralisme keagamaan dapat dipahami dengan paling baik dalam kaitannya dengan sebuah logika yang melihat satu yang berwujud banyak. *Kedua*, ada satu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama partikular sebagai alat; *Ketiga*, bahwa spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenalan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Ketiga tema atau prinsip itu bukan pemecahan tanpa hambatan dan masalah, karena diakui beberapa kesulitan untuk menerimanya. Juga ada hambatan terhadap pluralisme seperti kelompok-kelompok fundamentalis dalam setiap agama.^{iv}

Pengertian Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa latin “*tolerare*”, yang artinya bertahan, memikul. Toleran berarti saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Pihak lain tidak dipaksa, pendapat pihak lain tidak dicampuri. Itu berarti bahwa toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang yang lain disekitar dan disamping kita. Walaupun itu tidak berarti pula kepercayaan masing-masing harus diserahkan. Toleransi pun harus dibedakan dari konformisme, yaitu

menerima saja apa yang dikatakan orang lain, asal ada perdamaian dan kerukunan. Jadi, toleransi merupakan kerukunan umat beragama, yang dengan dasar dan titik tolak yang berbeda-beda, saling memikul untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sikap toleransi diwujudkan dalam bentuk interaksi dan kerja sama antara berbagai golongan.^v

Umat Islam Indonesia telah mewujudkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain pada saat merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan embrio untuk persiapan rumusan Pembukaan UUD 1945. Untuk memperoleh kesepakatan akhir dalam merumuskan Pembukaan UUD 1945 telah menjadi tarik ulur panjang mengenai penghilangan tujuh kata. Dengan berbagai pertimbangan yang mengedepankan kepentingan umum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para tokoh Islam akhirnya menyetujui permintaan tokoh agama lain untuk tidak dicantumkan tujuh kata dalam naskah resmi Pembukaan UUD 1945. Dari Pembukaan inilah rumusan lima sila Pancasila di ambil. Karena telah melalui proses yang cukup panjang, maka ketika mengemuka lagi dalam pendewasaan demokratisasi, jawaban tegasnya adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil final konsensus bangsa Indonesia dalam beragama, berbangsa dan bernegara.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah direalisasikan oleh para tokoh terdahulu. Manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi oleh agama lain. Ini merupakan jalan keluar yang harmonis antar nilai agama. Ini juga solusi untuk menghindari benturan antara nilai agama.^{vi}

Menurut Atho', salah satu model terbaik menyelesaikan benturan agama adalah melalui dialog pengembangan wawasan multikultural antar pemuka agama. Dengan dialog, diharapkan tercapai pemahaman yang lebih baik di samping mewaspadai berbagai faktor yang terkait hubungan antar umat beragama, baik yang mendorong konflik maupun yang memiliki potensi integrasi. Melalui dialog akan mengidentifikasi kearifan lokal guna merajut kerukunan beragama. Kearifan lokal yang dimaksud seperti: *dalihan na tolu di Sumatera Utara, Siro yo ingsun, Ingsun yo Siro di Jawa Timur, Sipakalebbi dan Sipakatau dari Sulawesi Selatan, menyama braya dari Bali, rumah betang dari Kalimantan, Fan Ngin Thing Ngin Jit Jong, dari Bangka Belitung.*^{vii} Kondisi keagamaan

dan budaya di Indonesia yang majemuk perlu dikembangkan melalui saluran-saluran komunikasi yang efektif antar berbagai daerah guna meredam potensi konflik.

Landasan Toleransi Agama di Indonesia

Mengapa masalah toleransi menjadi penting untuk dikemukakan? Bukankah masing-masing penganut agama memegang dan memiliki keyakinan yang tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk dikompromikan (ditoleransikan)? Jika demikian, bagaimana mungkin toleransi itu dapat dilaksanakan? Adakah toleransi dalam agama? Kasus kerusuhan yang terjadi di Ambon, Situbondo, Kalimantan, bom Bali I dan bom Bali 2, semuanya terkait erat dengan bias kehidupan beragama. Penyebabnya karena kekurangpahaman akan hal-hal yang berkaitan dan belum memahami makna toleransi di kalangan penganut agama.

Toleransi perlu ditumbuhkembangkan pada masyarakat yang majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam banyak hal. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang menganut berbagai agama. Wilayah Indonesia meliputi areal yang luas, terdiri dari beribu-ribu pulau. Sila pertama pada Pancasila memberi peluang untuk adanya toleransi agama. Pancasila merupakan pandangan hidup yang “*eclectic*” bagi bangsa Indonesia, dalam artian bahwa persoalan politik, ekonomi dan agama saling terjalin antara satu dengan yang lain sebagai keutuhan. Toleransi agama berdasarkan Pancasila adalah toleransi agama secara positif dan tidak memberi peluang bagi politheisme, atheisme dan nihilisme.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah “ideologi” dan “falsafah” Negara. Oleh karena itu di dalam Pancasila itu ada ide-ide seperti: koeksistensi, proeksistensi dan toleransi dengan tujuan agar warga masyarakat yang beraneka ragam itu hidup rukun sebagai bangsa yang senasib seperuntungan. Pengertian koeksistensi itu khas Indonesia yang memberi tempat bagi perorangan dalam kebersamaan dan dengan demikian dimungkinkan adanya proeksistensi, artinya seorang harus mampu hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Sebagai proses lanjutan dari proeksistensi menuntut adanya sikap tenggang rasa masyarakat. Dengan koeksistensi, proeksistensi dan toleransi positif, memungkinkan bangsa Indonesia bersikap reseptif dan

terbuka terhadap hal-hal yang datang dari luar, yang kemudian membaaur dalam suatu kebersamaan.

Mengenai hubungan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila-sila lainnya dengan agama dalam mendukung pembangunan, presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1968 mengatakan bahwa :”Dalam rangka falsafah Pancasila, maka pelaksanaan kehidupan beragama harus dapat membawa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, harus dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dapat menyetatkan pertumbuhan demokrasi, yang kesemuanya itu akan membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran serta kebahagiaan lahir dan batin. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi pancaran keagamaan kepada sila-sila yang lain, memberi petunjuk jalan dan bimbingan dalam melaksanakan sila-sila yang lain.”^{viii}

Dengan berlandaskan al-Qur’an, umat Islam wajib menanamkan sikap toleransi kepada penganut agama lain. Demikian pula halnya dengan penganut agama lain yang memiliki landasan dari Kitab Suci mereka. Dan dengan landasan Pancasila, sebagai bangsa Indonesia rakyat Indonesia juga harus melestarikan toleransi terhadap seluruh penganut agama yang ada di Indonesia. Menganut suatu agama bertolak dari keyakinan yang terletak pada hati nurani manusia, oleh karena itu keyakinan agama bukan dipaksakan lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksakan dari luar. Dilihat dari segi hidup kita sebagai satu bangsa merdeka yang berpancasila, maka kebebasan memeluk keyakinan Agama itu merupakan salah satu wujud daripada pelaksanaan hak-hak azazi manusia yang kita junjung tinggi. Jadi, pengertian toleransi agama bagi kita adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk sesuatu agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadah....Toleransi agama jelas meminta kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab.^{ix}

Kebesaran jiwa dan kebijaksanaan menunjukkan kedewasaan suatu bangsa. Demikian pula dalam hal menghormati bahasa dan gagasan pihak lain. Dalam kaitan ini, Karl Rahner berpendapat bahwa masalah pluralisme tidak dapat di atasi, karena tidak ditemukannya landasan bersama. Ia menganjurkan pendekatan baru yang tidak simplistik dan eksklusif yang menghadapi masalah pluralisme dengan prinsip non-kontradiktif.

Rahner sependapat dengan Smith yang menganjurkan untuk belajar saling menghormati bahasa dan gagasan-gagasan pihak lain.^x

Filsafat Pancasila pada hakekatnya adalah menunjukkan penglihatan bangsa Indonesia tentang pergaulan hidup manusia, khususnya mengenai tempat individu dalam pergaulan hidup, yaitu: kekeluargaan, yang artinya bahwa pergaulan hidup itu merupakan satu kesatuan, seolah-olah satu keluarga, sedangkan kedudukan individu-individu di dalamnya seperti di suatu keluarga diakui dan dilindungi kepribadiannya.^{xi}

Dari pidato-pidato kepala Negara dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional Negara kita meletakkan agama sebagai asas pembangunan yang pertama. Begitu pula dengan Dasar Negara, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan betapa faktor agama menjadi begitu dominan dalam tata kehidupan kita. Seakan-akan agama tidak bisa dilepaskan dalam konteks hubungan antar manusia dan pembangunan. Bahkan, sekiranya tidak berlebihan jika dikatakan tanpa peranan agama, mustahil pembangunan dapat berhasil dan dinikmati seperti sekarang ini.

Dampak positif agama yang demikian itu muncul dari nilai-nilai intrinsik agama, seperti motivator, inspirator, dan dinamisator. Dengan memeluk agama secara teguh, maka seseorang akan terdorong untuk berbuat kebajikan, memiliki cita-cita yang positif dan berkeyakinan untuk selalu hidup dalam keadaan yang lebih baik (dinamis). Sebaliknya, berusaha untuk menjauhi sikap pesimisme, berbuat destruktif dan cara berpikir yang tidak mengarah pada kemajuan.^{xii}

Jika ditinjau dari aspek kebenaran ajaran suatu agama, agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik (intoleransi). Bukan saja konflik antar agama, tetapi juga konflik intra agama. Yang terakhir ini sering disebut juga konflik antar mazhab. Dan itu terjadi pada semua agama termasuk agama-agama monotheisme, seperti Islam, Yahudi dan Nasrani.

Beberapa langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antar umat beragama, yaitu: *pertama*, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama dan sebaliknya tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama; *kedua*, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama

yang berbeda, *ketiga*, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek *universal –rabbaniyyah*; *keempat*, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan *akhlaq al-karimah*; *kelima*, menghindari sikap egoism dalam beragama sehingga mengklaim dirinyalah yang paling benar.

Pada **langkah pertama**, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama dan sebaliknya tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. Setiap agama memiliki dua aspek ajaran; *pertama*, ajaran agama yang bersifat universal, dan *kedua*, ajaran agama yang bersifat kolegiel dan individual. Ajaran agama yang bersifat universal biasanya menyangkut aspek seperti tujuan hidup beragama, aspek moral dan etika, keadilan, tanggung jawab, persamaan hak dan lain-lain. Sedangkan ajaran agama yang bersifat kolegiel dan individual berkaitan dengan hal-hal seperti tatadara beribadah, tradisi keagamaan, sumber acuan normatif dan metodologi pengambilan keputusan (hukum).^{xiii}

Semua agama sepakat, bahwa moralitas adalah hal yang paling penting dalam tata pergaulan hidup. Ketinggian dan keutamaan seseorang dilihat dari sejauh mana ia menegakkan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam pergaulan, baik dalam skala mikro (keluarga) maupun skala makro (anggota masyarakat dan antar bangsa).

Langkah kedua, adalah melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. Dalam kegiatan hidup bersama, mustahil seseorang mampu menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupannya secara perorangan. Ia mesti membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian, ia mesti berhubungan dengan orang lain pula. Dalam hal inilah, keterlibatan orang lain yang berbeda agama seringkali tidak terelakkan, baik dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, social, pendidikan dan politik.

Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8, Allah menegaskan bahwa al-Qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama yang harmonis. Bahkan, al-Qur'an sama sekali tidak melarang seorang

muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapa pun, termasuk yang berbeda agama, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari negeri / tempat tinggal mereka.

Langkah ketiga, adalah merubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal *rabbaniyah*. Maksudnya, Islam agama *rahmatan li al-'alamin*, oleh sebab itu umat Islam mestinya memperlihatkan ketinggian akhlaknya kepada penganut agama lain, bukan malah sebaliknya, melakukan kerusuhan sosial di wilayahnya. Menurut Abdurrahman Wahid, kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai daerah tidak lain adalah disebabkan oleh kesalahan pendidikan. Kesalahan pendidikan yang dimaksud adalah terlalu kuatnya tekanan pendidikan pada masalah fiqih. Padahal kajian terhadap fiqh akan mudah membukakan seseorang pada persoalan *ikhtilafiah* (perbedaan). Siswa sejak dini sudah dikenalkan dengan masalah *furu'iyah*, sementara itu, doktrin tauhid dan implikasi sosialnya tidak diberikan kepada siswa kecuali sebatas hafalan *asmaul husna*. Ataupun untuk taqlid pada satu paham atau mazhab tertentu. Disamping itu, ranah afektif pelajaran aqidah akhlak jauh lebih kecil kapasitasnya dibandingkan dengan ranah kognitif. Oleh karena itu, tidak jarang kita temukan siswa yang secara serius menjalankan perintah agama dalam rukun Islam (sholat, puasa, zakat dan haji), namun tidak merasa bersalah ketika memusuhi dan mencaci maki tetangganya, baik seagama maupun yang berbeda agama dengan dia.

Langkah keempat, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlak al-karimah. Pembinaan individu ini lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat tempat tinggal. Sebab, membentuk kepribadian adalah bentuk transformasi nilai yang sifatnya kontinu. Padahal pendidikan di sekolah sangat terbatas waktunya.

Langkah kelima, menghindari sikap egoisme dalam beragama. Sikap egoisme sangat berbahaya, baik buat dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Egoisme lebih mengedepankan emosional daripada logika, sehingga seringkali menggunakan cara-cara pragmatis dan adu fisik dalam menyelesaikan masalah.^{xiv}

Sudah menjadi kewajiban bagi penganut agama untuk memahami beberapa hal, yaitu:

1. Agama menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Agama bukan saja berguna sebagai pembimbing rohani manusia dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, tetapi juga sebagai kendali moral kehidupan manusia yang semakin kompleks dan materialistik.
2. Dalam makna positif, sebaiknya yang ditonjolkan adalah nilai-nilai universal agama, seperti moralitas, keadilan, kesamaan hak, tanggungjawab dan aspek eskatologis agama. Jika hal-hal substansial itu diabaikan, maka yang akan terjadi adalah perpecahan.
3. Perlu pembinaan kepribadian individu melalui pembiasaan berbudi pekerti luhur dan saling menghormati dengan tetap menjaga integritas keyakinan agamanya sendiri.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam surah al- Mumtahanah terdapat dua ayat yang memberi batasan secara jelas tentang menciptakan hubungan horizontal yang harmonis:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.” (QS. 60:8).^{xv}

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Islam tidak memaksa orang untuk meninggalkan agamanya agar memeluk Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa terhadap orang non-muslim yang tidak memerangi kita dan tidak membantu terhadap musuh-musuh kita, tidak ada larangan untuk berbuat baik, berlaku adil, dan mempergauli mereka dengan baik. Sebaliknya, bagi non-muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam, maka sebaiknya kita menjaga jarak terhadap mereka.

Akhirnya, mari kita tampilkan Islam yang *rahmah li al-alamin* guna mewujudkan kedamaian bagi seluruh alam, memberi daya tarik melalui nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. *Insyah Allah.*

Rina Rehayati, M.Ag adalah dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Catatan kaki:

- ⁱ Amsal Bakhtiar, *Beragama Yang Fanatik Tanpa Sikap Ekstrem*, “Jurnal Refleksi”, Vol. VII, No. 1, 2005
- ⁱⁱ Charles Kimball, *Kala Agama Menjadi Bencana*, Penerjemah Nurhadi, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003
- ⁱⁱⁱ K. Ali, Prof. *Sejarah Islam*, Jakarta: Srigunting, 1997, hlm. 45-47
- ^{iv} Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan Bagi Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989. Lihat: *Jurnal Filsafat Lembaga Studi Filsafat (LSF)*, hlm. 80-81
- ^v Seno Harbangan Siagian, *Agama-Agama di Indonesia*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm. 96-97. Lihat juga: Yusuf Qardlawi, *Keprihatinan Muslim Modern*, Surabaya: Duni Ilmu, 1996, hlm. 99-107
- ^v Seno, Harbangan Siagian, *Ibid*, 96
- ^{vi} A.Qadri Azizy, “Agama dalam Bernegara”, *Republika*, Rabu 15 Agustus 2007
- ^{vii} “Dialog Multikultural Meredam Konflik”, *Republika*, Senin, 9 Juli 2007. Bandingkan dengan tulisan I Ketut N. Natih, “Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu”, *Jurnal Refleksi*, Vol. VII, No.1, 2005, hlm.27-39
- ^{viii} *Ibid.*, hlm. 102
- ^{ix} Pidato Presiden pada Peringatan Nuzul al-Qur’an, 19 Desember 1967
- ^x Harold Coward, “Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama”, *Jurnal Filsafat*, Lembaga Studi Filsafat, Thn I, no.1, hlm. 78-80
- ^{xi} Seno, *Op.Cit.*, hlm. 103
- ^{xii} Akhmad Roziqin, *Membudayakan Toleransi dan Kerukunan: Beragama di Abad 21*, Jakarta: Zikrul Hakim, 1987, hlm. 86-87

^{xiii} *Ibid.*

^{xiv} *Ibid*, hlm. 92-94

^{xv} Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1984, hlm. 1107